

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era Revolusi Industri 4.0, transformasi digital dalam pengelolaan pemerintahan telah menjadi suatu keharusan. Berbagai pemerintah di seluruh dunia berlomba-lomba mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan memperluas keterlibatan masyarakat. Seiring dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerapan *electronic government* di Indonesia semakin massif, memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam layanan publik.

Di mata masyarakat digitalisasi pun dianggap sebagai alat politik untuk memperkuat legitimasi pemerintah dan itupun termasuk kedalam upaya modernisasi administratif. Salah satunya provinsi Jawa Barat yang menjadi pelopor terhadap penerapan digitalisasi pada pelayanan publik melalui aplikasi “Sapawarga”. *Super-app* ini diluncurkan pertama kali di tahun 2019 dengan mengintegrasikan berbagai layanan, seperti informasi program pemerintah, pengaduan masyarakat, transaksi elektronik seperti pembelian tiket wisata, hingga layanan kesehatan yang dihadirkan oleh super-app “Sapawarga” ini. Pada tahun 2024 “Sapawarga” telah diunduh oleh lebih dari 2 juta pengguna dan menjadi salah satu model inovasi digital *best practice* pemerintah daerah di Indonesia. Untuk mewujudkan visi “*smart province*” aplikasi “Sapawarga” menjadi simbol dari upaya pemerintah Provinsi Jawa

Barat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sapawarga” merupakan aplikasi yang diadopsi pemerintah Kota Tasikmalaya untuk berbagai sektor, sektor pariwisata khususnya. Sektor pariwisata dipilih sebagai prioritas digitalisasi dikarenakan mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyerapan tenaga kerja. Pemerintah Kota Tasikmalaya pada 17, Oktober 2024 resmi meluncurkan *e-ticketing* “Sapawarga” di Situ Gede, dengan menjadikan objek wisata ini sebagai *pilot project* digitalisasi pariwisata di Kota Tasikmalaya. Agar meningkatkan efisiensi pengelolaan, transparansi pendapatan, dan kemudahan akses bagi wisatawan langkah ini sangat diharapkan bagi Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya dalam konteks objek wisata Situ Gede, penerapan *e-ticketing* pada aplikasi “Sapawarga” berpotensi membawa dampak yang beragam dari berbagai pihak yang bahkan objek wisata Situ Gede ini ialah objek wisata yang telah beroperasi sejak era kolonial Belanda dan hingga saat ini menjadi ruang publik yang sangat penting bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Di kawasan Situ Gede ini terdapat beberapa ekosistem ekonomi informal yang justru telah terbentuk sejak puluhan tahun lamanya, dengan meliputi pedagang makanan serta minuman, penyewa perahu, pedagang souvenir, juga berbagai usaha mikro yang telah berkembang di objek wisata Situ Gede dan menggantungkan hidupnya dari aktivitas yang ada di objek wisata Situ Gede tersebut.

Sistem *e-ticketing* dan digitalisasi pengelolaan yang diluncurkan berpotensi untuk mengubah pola akses serta distribusi untuk keuntungan di kawasan Situ Gede ini. Selanjutnya, digitalisasi pun dapat meningkatkan transparansi pendapatan juga mempermudah wisatawan untuk mengakses informasi terkait Situ Gede dan membeli tiket. Di sisi lain, beberapa kekhawatiran muncul pada proses digitalisasi ini dengan disertai restrukturisasi tata kelola kawasan bahkan dapat mengancam keberlangsungan usaha pedagang kecil terlebih jika tidak disertai dengan mekanisme perlindungan dan inklusi ekonomi yang memadai.

Terkait kekhawatiran pada digitalisasi ini bukan tanpa sadar, (Aritonang, D., *et. all.* 2021) penelitian mengenai kebijakan pariwisata di Indonesia memperlihatkan pola yang konsisten seperti kebijakan pengembangan destinasi wisata ini seringkali menghasilkan keuntungan yang timpang, karena pelaku usaha besar serta pemerintah mendapat manfaat ekonomi yang bahkan lebih besar dibandingkan dengan pedagang kecil dan masyarakat lokal yang ada di sekitaran destinasi wisata tersebut. Pada kasus-kasus lainnya, proses modernisasi serta penataan kawasan wisata ini berujung marginalisasi ekonomi pada masyarakat lokal, baik itu dengan melalui relokasi secara paksa, kenaikan biaya sewa atau retribusi, apalagi persaingan yang tidak seimbang antara pedagang kecil dan pelaku usaha besar yang memiliki usaha besar dan modal serta akses politik yang bahkan lebih kuat.

Daripada itu, terdapat isu krusial lainnya terkait partisipasi masyarakat pada proses perumusan serta implementasi kebijakan. Terdapat literatur

terkait tata kelola pariwisata yang ada di Indonesia dan menunjukkan bahwasannya masyarakat lokal sering tidak dilibatkan secara substantif pada saat proses pengambilan keputusan yang keputusan itu bahkan nantinya berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Kebijakan yang disosialisasikan oleh pemerintah daerah kebanyakan bersifat *top-down* serta isinya lebih merupakan pada pemberitahuan daripada dialog dua arah dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi, keberatan atau usulan alternatif yang lainnya.

Peluncuran *e-ticketing* pada objek wisata Situ Gede di aplikasi “Sapawarga” tidak ditemukan informasi yang menunjukkan adanya proses konsultasi kepada publik, publik saat itu meliputi pedagang dan warga sekitar. Tampaknya, peluncuran ini merupakan hasil keputusan administratif di tingkat pemerintah daerah yang tanpa mekanisme partisipasi masyarakat terstruktur. Ketiadaan dokumentasi publik terkait hal ini proses kebijakan diindikasikan dirumuskan secara *top-down*, di mana masyarakat tidak ditempatkan sebagai subjek yang aktif dalam proses kebijakan, melainkan masyarakat hanya dijadikan sebagai objek yang pasif dengan hanya menerima kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lebih jauh lagi, proses pengembangan kawasan Situ Gede setelah revitalisasi tahun 2023 diduga melibatkan kepentingan dari investor swasta. Saat meresmikan revitalisasi Situ Gede di Januari 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menugaskan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengundang investor agar membangun fasilitas penginapan di area tersebut, dengan alasan bahwa keindahan Situ

Gede harus dioptimalkan potensi ekonominya. Gubernur Jawa Barat pada saat itu menginstruksikan dengan adanya rencana pengembangan komersial berskala besar dengan partisipasi modal swasta, yang dapat mengubah sifat Situ Gede dari ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum menjadi kawasan wisata yang lebih tertutup dan menargetkan kalangan menengah atas. (Rukanda, 2023).

Jika rencana ini berhasil, penerapan “Sapawarga” akan menjadi bagian dari restrukturisasi ekonomi politik di kawasan Situ Gede, bukan sekadar digitalisasi pelayanan, dan berpotensi menguntungkan kelompok tertentu. Pemerintah daerah, investor swasta, dan pelaku usaha besar merupakan bagian dari kelompok tertentu, sedangkan masyarakat kecil berisiko terpinggirkan. Fenomena ini mengingatkan pada konsep yang dikemukakan (Harvey., 2005), yaitu akumulasi melalui disposisi, di mana proses pengumpulan modal dilakukan dengan mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya publik yang sebelumnya mereka manfaatkan. Penelitian ini memanfaatkan kerangka teori keadilan sosial Nancy Fraser untuk menganalisis dinamika politik dalam penerapan kebijakan “Sapawarga” di objek wisata Situ Gede Tasikmalaya, dengan fokus pada dua aspek utama redistribusi dan rekognisi. (Satrio Wibowo & Arviana Belia, 2023).

Dengan menggunakan kerangka teori Fraser, analisis terhadap kebijakan “Sapawarga” di Situ Gede menjadi lebih komprehensif, khususnya dalam memahami dinamika politik yang terjadi, termasuk proses redistribusi

manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dan pengakuan terhadap aspirasi masyarakat lokal, serta potensi konflik dan negosiasi di antara berbagai aktor (Knijn & Lepianka, 2020). Dalam kerangka kebijakan *e-government*, Efektivitas implementasi *e-government* dalam pelayanan publik di era digital. Penelitian ini menganalisis kepuasan pengguna dan efisiensi pelayanan setelah menerapkan *e-government* di beberapa daerah di Indonesia. Temuan utama pada penelitian ini yaitu *e-government* meningkatkan waktu dan biaya pelayanan, dan kepuasan pengguna relatif tinggi. Namun, masih ada perbedaan dalam literasi digital antara generasi muda dan lansia, infrastruktur teknologi di daerah masih menjadi hambatan, dan aspek partisipasi dan transparansi belum optimal. Relevansi penelitian ini memberikan konteks umum tentang penerapan *e-government* di Indonesia. Namun, prioritas utamanya adalah kepuasan pengguna dan kebutuhan teknis daripada pertimbangan politik. Adapun perbedaan yaitu, Penelitian Rahman dkk menggunakan metode evaluasi-teknis. Studi ini akan menyelidiki hubungan antara kekuasaan dan kepentingan di balik implementasi “Sapawarga” dengan menggunakan metodologi politik kebijakan (Rahman, A. *et. al*, 2021).

Alasan pemilihan Situ Gede sebagai pusat penelitian didasarkan pada pertimbangan strategis dari sudut pandang teori dan aplikasi. Situ Gede berfungsi sebagai proyek percontohan digitalisasi pariwisata yang strategis di Kota Tasikmalaya. Sebagai objek wisata yang menerapkan *e-ticketing* “Sapawarga” di Tasikmalaya, situasi di Situ Gede dapat menjadi contoh bagi penerapan kebijakan serupa di destinasi wisata lain di masa mendatang. Nilai

generalisasi teoretis dari pelajaran kasus Situ Gede dapat digunakan dalam konteks yang sejenis (Azizah Genuita *et all.*, 2023).

Kemudian, Situ Gede juga memiliki berbagai aktor yang kompleks dan layak untuk dikaji. Situ Gede, sebagai objek wisata yang sudah beroperasi sejak era kolonial dan berfungsi sebagai ruang publik masyarakat Tasikmalaya, melibatkan berbagai aktor seperti, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pengelola wisata, pedagang formal dan informal, warga sekitar, wisatawan, serta calon investor swasta. Dinamika politik kebijakan dapat dianalisis secara mendalam berkat data yang diperoleh dari interaksi dan relasi kekuasaan di antara aktor-aktor ini. Ada kemungkinan ketegangan terjadi antara aspirasi modernisasi dan kepentingan masyarakat lokal. Menurut literatur mengenai kebijakan pariwisata di Indonesia, pengembangan destinasi wisata yang melibatkan modal swasta dan digitalisasi sering kali menimbulkan konflik kepentingan di antara berbagai aktor. Di Situ Gede, dengan adanya instruksi untuk mengundang investor dan penerapan sistem *e-ticketing*, terdapat peluang besar untuk terjadinya ketegangan seperti ini (Dea Ajeng Inggil Santosa *et all.*, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketegangan tersebut diperlakukan, dinegosiasikan, atau diabaikan selama proses pembuatan kebijakan.

Dampak ekonomi digitalisasi destinasi wisata terhadap UMKM lokal. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan akses pasar bagi UMKM yang memiliki literasi digital. Namun, UMKM tradisional, seperti pedagang kaki lima dan penjual souvenir tradisional, mengalami penurunan pendapatan

karena tidak mampu beradaptasi dengan sistem digital. Terjadi polarisasi ekonomi UMKM modern berkembang, sementara UMKM tradisional termarginalisasi. Untuk mengimbangi keuntungan digitalisasi, program pendampingan dan inklusi digital diperlukan. Perbedaan penelitian ini yaitu, penelitian Wulandari & Sari berkonsentrasi pada dampak ekonomi. Dan untuk penelitian ini fokus dinamika politik yang akan dibahas adalah siapa yang menentukan kebijakan, kepentingan apa yang bermain, dan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan (Wulandari, D., & Sari, N, 2022).

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa hal, substansi baru. Hasil penelusuran literatur yang dilakukan hingga Januari 2025 menunjukkan bahwa belum ada penelitian akademik yang secara khusus menyelidiki proses kebijakan kebijakan penerapan “Sapawarga” di objek wisata tertentu khususnya Situ Gede Kota Tasikmalaya dalam hal dinamika yang berkaitan dengan penerapan kebijakan tersebut. Sebagian besar penelitian tentang “Sapawarga” berkonsentrasi pada elemen teknis implementasi *e-government*, evaluasi kepuasan pengguna, atau efektivitas layanan (Satibi, *et all.*, 2024), namun tidak ada penelitian yang mengkaji dari sudut pandang kebijakan politik dengan mempertimbangkan hubungan kekuasaan, kepentingan aktor, dan dinamika pengambilan keputusan. Penelitian ini merupakan literatur pertama yang mengisi kekosongan ini, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian serupa yang dilakukan di tempat lain.

Selanjutnya, peningkatan metode. Untuk menangkap berbagai

perspektif tentang proses kebijakan, penelitian ini akan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai aktor, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, pedagang kecil, dan warga sekitar. Analisis aktor, analisis dokumen kebijakan, dan observasi lapangan akan memungkinkan penelitian ini untuk mengungkap apa yang dikatakan oleh para aktor serta apa yang tidak mereka katakan dan siapa yang tidak diberi ruang untuk berbicara. Metode ini sejalan dengan gagasan (Steven Lukes. 2021) tentang “tiga dimensi kekuasaan”, menekankan betapa pentingnya menganalisis kekuasaan dari pilihan yang terlihat dan agenda preferensi yang dibuat.

Dengan kebaruan waktu bahwa Kebijakan Implementasi “Sapawarga” di Situ Gede baru diluncurkan pada Oktober 2024, penelitian ini dilakukan saat kebijakan dan proses masih sangat baru. Hal ini memungkinkan untuk mengamati dinamika yang terjadi secara *real-time*, seperti respons dari berbagai pihak, perubahan kebijakan, dan konflik yang muncul. Penelitian yang dilakukan pada tahap awal implementasi sangatlah penting karena dapat memberikan saran untuk perbaikan kebijakan sebelum dampak buruk menjadi terlalu besar dan sulit diubah.

Pada konteks penelitian ini, dinamika politik implementasi kebijakan “Sapawarga” di Objek Wisata Situ Gede Tasikmalaya mencakup beberapa dimensi yang saling terkait seperti dinamika vertikal yaitu tingkat pemerintahan, dinamika horizontal antara instansi pemerintah di tingkat sama, antar negara dan pasar, antar negara dan masyarakat, juga dinamika internal pada masyarakat. dinamika politik memerlukan analisis dengan

mengintegrasikan tiga dimensi yang saling terkait yaitu dimensi politik, dimensi masyarakat, serta dimensi kebijakan.

Dari sudut pandang politik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat termotivasi untuk memaksimalkan potensi ekonomi aset provinsi melalui pengembangan pariwisata komersial berskala besar. Sebaliknya, Pemerintah Kota Tasikmalaya bertujuan untuk menunjukkan kinerja inovasi pelayanan publiknya melalui digitalisasi. Pengenalan *e-ticketing* selama perayaan ulang tahun Kota dapat diartikan sebagai strategi simbolis untuk menumbuhkan citra pemerintahan modern namun, peluncurannya di akhir masa jabatan Pelaksana Tugas Walikota menimbulkan pertanyaan mengenai motif politik. Investor swasta menginginkan akses eksklusif, namun pada kenyataannya, kurangnya minat investasi. Sementara itu, pedagang kecil dan masyarakat setempat berupaya mempertahankan akses ekonomi tetapi mendapati diri mereka berada dalam posisi tawar yang lemah karena kurangnya organisasi kolektif dan akses terbatas ke arena pengambilan keputusan.

Dari sudut pandang masyarakat, dampak kebijakan bervariasi berdasarkan status sosial ekonomi dan akses ke sumber daya digital. Bagi pengunjung yang memiliki literasi digital, sistem tiket elektronik memberikan kemudahan. Namun, bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi, hal itu dapat menimbulkan tantangan yang signifikan. Bagi pedagang kecil, dampaknya beragam seperti mendapat manfaat dari peningkatan jumlah pengunjung, namun mereka juga menghadapi risiko terpinggirkan jika digitalisasi menjadi bagian dari agenda komersialisasi. Muncul pertanyaan

penting mengenai bagaimana pedagang menanggapi kebijakan ini apakah mereka menerimanya secara pasif, menggunakan strategi perlawanan informal, ataukah mereka terpaksa menanggung keadaan yang merugikan karena ketergantungan ekonomi.

Dari sudut pandang kebijakan, peluncuran *e-ticketing* memicu pertanyaan tentang keselarasan antara tujuan yang dinyatakan dan proses perumusan serta implementasinya. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, seharusnya hal itu dipadukan dengan kerangka pemantauan yang kuat dan penyebaran data terbuka namun, hal ini masih kurang. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan arus wisatawan, seharusnya hal itu diiringi dengan perbaikan infrastruktur fisik pada kenyataannya, infrastruktur tersebut berada dalam kondisi yang sangat rusak. Jika tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal dan mendistribusikan manfaat ekonomi secara adil, seharusnya hal itu melibatkan keterlibatan masyarakat dan inisiatif dukungan untuk pedagang kecil namun ketiadaan konsultasi publik menunjukkan bahwa pertimbangan keadilan sosial tidak diprioritaskan. Kurangnya konsistensi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih mencerminkan pola pikir teknokratis dan agenda politik jangka pendek daripada komitmen tulus terhadap tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini juga terlihat dari lapangan di mana petugas pelaksana tidak dibekali panduan yang memadai sehingga mereka terpaksa mengambil keputusan sendiri dan disitu kebijakan ini dibentuk. (Lipsky, 2010)

Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan partisipasi digital yang lebih inklusif dan demokratis. Penelitian ini juga dapat membantu masyarakat sipil dan kelompok marginal menuntut lebih banyak partisipasi dalam proses kebijakan publik. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan informasi akademis tetapi juga memiliki manfaat praktis untuk memperbaiki tata kelola kebijakan publik Indonesia. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, kemajuan dalam konteks interdisipliner. Studi ini merupakan persimpangan dari ilmu politik, studi pemerintahan, dan studi pariwisata. Penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kompleksitas kebijakan digitalisasi pariwisata dengan menggabungkan pandangan dari berbagai disiplin ilmu ini. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi, tetapi juga untuk menganalisis secara kritis kekuasaan berfungsi dalam proses kebijakan, siapayang mendapat manfaat dan bagaimana kebijakan publik dapat dibuat lebih adil dan demokratis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu politik, khususnya dalam memahami kompleksitas kebijakan politik di tingkat lokal di Indonesia modern. Penelitian ini akan menyelidiki secara menyeluruh dinamika politik kebijakan “Sapawarga” di Situ Gede. Terakhir, diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendorong tata kelola kebijakan publik Indonesia menjadi lebih berpartisipasi, jujur, dan transparan. Dengan mengungkap dinamika kekuasaan dan kepentingan yang tersembunyi di balik

kebijakan publik, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi upaya demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pada saat ini beberapa pedagang kecil yang terdapat kurang lebih hampir 60 pedagang kecil.

Revitalisasi Situ Gede dilatarbelakangi keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengeksplorasi potensi pariwisata di dalam kota Tasikmalaya, yang sebelumnya belum tertata dengan baik. Destinasi wisata Situ Gede Tasikmalaya berada di tengah-tengah tata kelola pemerintahan yang kompleks dengan berbagai pihak politik dan ekonomi. Wisatawan ini sebagian besar dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat. PSDA telah mengucurkan anggaran revitalisasi tahap pertama sebesar Rp 6,3 hingga 8 miliar pada tahun 2023 untuk membangun 34 kios pedagang, kawasan foodcourt, pejalan kaki, dan ornamen tanda. Pada 14 Januari 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum meresmikan langsung restorasi dengan tujuan meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan bisnis lokal. Ironisnya, investasi miliaran rupiah tersebut tidak menghasilkan hasil yang memuaskan karena sebagian besar pedagang memilih menempati kios baru karena desain yang dianggap tidak praktis. Di sisi lain, infrastruktur jalan di daerah tersebut telah mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun, yang mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan sebesar lima puluh persen. Tidak ada investor swasta besar yang menanggapi ajakan Gubernur Ridwan Kamil untuk membangun hotel di kawasan Situ Gede. Bahkan PT Alexandria

Realtindo, yang bekerja sama dengan Sahid Hotels & Resorts, memilih untuk membangun Andalusia Resort di lokasi yang lebih strategis dekat Tol Getaci daripada di kawasan Situ Gede secara langsung.

Dalam hal operasional manajemen, Situ Gede dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Deddy Mulyana. Dengan tujuan pembayaran sekitar 100 juta rupiah setiap tahunnya. Wakil Pengelola Objek Wisata Situ Gede, Iwan Kartiwan, mengatakan bahwa selama dua tahun, keluhan tentang kerusakan infrastruktur hanya mendapat respon verbal tanpa tindakan nyata karena perbedaan kewenangan antara Provinsi Jawa Barat sebagai pemilik aset sebagian besar dan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai pengelola operasional. Sebaliknya, 34 pedagang kecil dan 32 penyewa perahu, yang sangat bergantung pada wisatawan selama hari libur, adalah pelaku usaha lokal yang memajukan perekonomian daerah. Namun, tidak ada informasi yang jelas mengenai dampak kebijakan terhadap kesejahteraan mereka atau pemerintah memberikan kemudahan atau perlindungan ekonomi.

Di akhir masa jabatannya, Penjabat Wali Kota Cheka Virgowansyah meluncurkan kebijakan digitalisasi melalui *e-ticketing* Sapawarga pada 17 Oktober 2024, bertepatan dengan HUT ke-23 Kota Tasikmalaya. Dengan harga Rp 5.000 per orang, sistem tiket digital ini memungkinkan pengunjung membeli tiket melalui aplikasi Sapawarga, yang secara teoritis dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi pengelolaan

pembayaran. Namun, kebijakan ini diluncurkan hanya empat bulan setelah transisi kepemimpinan Wali Kota definitif Viman Alfarizi Ramadhan dilantik pada 20 Februari 2025. Pada 14 Januari 2026, Cheka Virgowansyah dipromosikan menjadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selama masa transisi kepemimpinan ini, ada kebijakan yang diterbitkan karena tidak adanya informasi publik mengenai komitmen Wali Kota baru untuk melanjutkan evaluasi dan pembangunan sistem e-ticketing Sapawarga. Selain itu, tidak ada informasi tentang sosialisasi kepada pelaku usaha lokal, cara partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, atau evaluasi dampak ekonomi terhadap kelompok rentan 34 pedagang dan 32 penyewa perahu. Dengan demikian, dinamika politik yang terlibat dalam *kebijakan e-ticketing* Sapawarga di Situ Gede Tasikmalaya mencerminkan paradoks modernisasi tanpa inklusi. Pemerintah berkonsentrasi pada transformasi digital dan penampilan kota kontemporer, tetapi mengabaikan perbaikan infrastruktur dasar dan pelibatan usaha kecil dalam proses perumusan kebijakan. Kebijakan yang terkesan *top-down* dan elitis dihasilkan oleh fragmentasi kewenangan antara kota dan provinsi, kurangnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya mekanisme untuk memastikan suara penyewa perahu dan pedagang kecil terartikulasi dalam ruang publik. Investasi pemerintah senilai miliaran rupiah menghasilkan *output* yang tidak dioptimalkan, sementara investor swasta menolak untuk berinvestasi di daerah karena risiko infrastruktur dan prospek ekonomi yang tidak jelas. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang keadilan distributif

kebijakan publik, transparansi alokasi anggaran dan retribusi, dan ketahanan agenda digitalisasi di tengah transisi kepemimpinan. Kasus Situ Gede Tasikmalaya menunjukkan kompleksitas tata kelola destinasi wisata di Indonesia di era digitalisasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dijadikan sebagai suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana dinamika politik penerapan kebijakan “Sapawarga” pada objek wisata Situ Gede Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas bahwa tujuan penelitian pada penelitian kali ini yaitu mengetahui bagaimana dinamika politik penerapan kebijakan “Sapawarga” pada objek wisata Sutu Gede Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian di atas, memiliki manfaat penelitian yang terbagi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperluas literatur mengenai proses politik dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi di tingkat lokal dan memberikan gambaran empiris tentang penggunaan Teori Redistribusi dan Rekognisi menurut Nancy Fraser dalam kebijakan pariwisata berbasis teknologi di Indonesia. Dan teori street level bureaucracy terkait

kebijakan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan untuk kajian selanjutnya terkait hubungan kekuasaan, dominasi elit, dan pembagian kepentingan dalam kebijakan publik

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun kebijakan digitalisasi pariwisata yang lebih melibatkan masyarakat secara aktif dan inklusif. Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil dapat mengandalkan hasil penelitian sebagai dasar empiris untuk mendorong kebijakan yang lebih demokratis dan memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat agar memperjelas ruang lingkup pada sebuah penelitian juga dapat menghasilkan sebuah uraian yang sistematis. Oleh karena itu, batasan masalah pada penelitian ini hanya membahas mengenai dinamika politik penerapan “Sapawarga” pada objek wisata Situ Gede Tasikmalaya. Selain daripada batasan masalah diatas penelitian ini akan menggunakan data primer seperti wawancara, dan survei. Selain primer penelitian ini juga akan mengadopsi dari data sekunder seperti laporan kinerja dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.